

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN INSTRUKSI
BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PENGUATAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN, DI DESA PENAMPI, KECAMATAN
BENGLALIS PADA TAHUN 2012-2013**

Oleh : Firdaus

Pembimbing : Adlin, S,Sos. M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau Pekanbaru
daizukedauz@rocketmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to determine's the community's participation implementation of the regent instruction number 01 of 2012 on strengthening on rural infrastructure in 2012-2013 in the Penampi village, Bengkalis regency were reviewed based on indicators of successful implementation of INBUP-PPIP. The main problem in this study is the decreasing number of communities participation that ocured in 2013, meanwhile the activities in increase basic infrastructure,. The theory in this research is the policy theory (teori kebijakan) and the theory of community participation in development (teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan). this reseach uses descriptive method by using aproach of kualitatif. this research uses purposive sampling and snowball sampling, namely interview with speakers as an object of information that purpose to achieved the goal. this research used primary data and secondary data has obtained throught observation and interview with informants.

Based on the result of the analysis of the research data in order to uncover and answer reseacrh question related to the analysis of public participation in the implementation of INBUP-PPIP program has been see from the stage of planning, implementation, and maintenance associated with indicators of the success of the program that focuses on the self-help and mutual help villagers of penampi, it's conclude that the villagers was participated in the form of attendance at meetings and village meeting, willingness to take a part of the OMS, the contribution of labor and land. however, there has been no participation in maintance. While the declaine that occurred in 2013 the impactof the probelms that occurred in the 2012 and as well as in the public incomprehension towards INBUP-PPIP program it self that gave birth to reluctance to participate even have an impact on mutual assistance society of Penampi villages

In addition, there are also constrain faced by the community participation in the implementation of INBUP-PPIP program in the village of Penampi, the time of the public, professionalism companion villages in the initial period 2012-2013 the implementation of that program, Pendamping Desa Penampi do not reside in that village

Keyword : community participation, INBUP-PPIP, Desa Penampi

PENDAHULUAN

Masyarakat di Indonesia sebagian besar tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 125 juta jiwa atau sekitar 60,02% dari seluruh penduduk Indonesia (data sensus penduduk) sementara itu angka kemiskinan di pedesaan cukup tinggi, dengan jumlah total penduduk miskin yaitu sebesar 37,04 juta jiwa (BPS 2005).

Kekayaan sumber daya alam dan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibalik itu Kabupaten Bengkalis juga menyimpan kemiskinan pada masyarakatnya. Dari data tahun 2009 pasca terjadinya pemisahan Kabupaten Meranti, jumlah angka kemiskinan di kabupaten sebesar 26.372 rumah tangga miskin, sedangkan pada tahun 2010 hanya sebesar 22.339 rumah tangga miskin, yaitu sekitar 4,48% dari total angka kemiskinan pada Provinsi Riau yaitu sebesar 500.260 rumah tangga miskin pada tahun 2010, menurun sekitar 5,16% dibanding tahun 2009, dan Kabupaten Bengkalis menurun sekitar 15% dibanding jumlah pada tahun 2009 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015).

Salah satu penyebab mengapa penurunan angka kemiskinan pada tingkat nasional, hingga lokal (Provinsi, Kabupaten Kota) bahkan sampai pada tingkat Desa tidak begitu drastis atau lambat yaitu karena masih minimnya Infrastruktur yang memadai sebagai penunjang bangkitnya perekonomian terutama di daerah pedesaan.

Menurut Rahardjo dalam Pembangunan Perdesaan (2013:78) bahwa pembangunan pedesaan yang partisipatif merupakan suatu konsep

fundamental dan dilakukan sejak dahulu hingga sekarang dan tetap relevan untuk masa depan. Dalam sistem pemerintahan desentralistik/otonomi daerah, mekanisme perencanaan pembangunannya adalah *bottom up*, dan partisipasi masyarakatnya dilakukan dengan kesadaran dan kebersamaan yang tinggi.

Pemerintah kabupaten Bengkalis dalam menjawab tantangan pembangunan di masa depan yang kian kompleks, yaitu dengan mengeluarkan suatu program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang dititik beratkan pada penguatan Infrastruktur dasar sebagai penunjang utama program pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat yang merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2010-2015 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan (Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011).

Instruksi Bupati nomor : 01 tahun 2012 tentang Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan atau (INBUP-PPIP) merupakan naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati kepada bawahannya :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten II Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Bengkalis
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bengkalis
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis
5. Camat se Kabupaten Bengkalis
6. Kepala Desa se Kabupaten Bengkalis.

Secara umum tujuan dari Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (Narasi INBUP-PPIP:2012-2013) adalah pemerataan dan percepatan penyediaan infrastruktur pedesaan dengan menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengelolaan.

Selanjutnya dijelaskan kembali didalam lampiran petunjuk teknis Program INBUP-PPIP Tahun 2012 bahwa Pelaksanaan kegiatan INBUP – PPIP dilakukan melalui pendekatan yakni bahwa Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara swakelola dengan pola OMS, padat karya dan terbuka dengan menggunakan tenaga kerja setempat.

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program INBUP – PPIP tersebut yakni :

1. Adanya swadaya dan kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program Penguatan infrastruktur pedesaan.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Fenomena yang terjadi di desa penampi ini menarik bagi penulis untuk diteliti, bahwa betapa jauh perbedaan antara sumbangsih pemerintah dengan swadaya masyarakat bahkan cenderung terjadi penurunan angka swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut, terlebih lagi bahwa Desa Penampi termasuk desa yang jaraknya cukup dekat dengan pusat pemerintah kecamatan bengkalis yaitu sekitar 6 km, dengan akses jalan yang cukup baik. maka akan menjadi suatu pengkajian yang cukup menarik bagi penulis terhadap pelaksanaan

program INBUP – PPIP di desa penampi tentang “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Instruksi Bupati Nomor 01 tahun 2012 tentang Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan, Di Desa Penampi, Kecamatan Bengkalis Pada Tahun 2012 – 2013*”.

Identifikasi Masalah

Merujuk pada survey Pra Penelitian yang penulis lakukan didapati permasalahan dalam pelaksanaan INBUP-PPIP di Desa Penampi pada tahun 2012-2013 yaitu Bahwa dalam pelaksanaan Program tersebut masih belum terbangun suatu sikap partisipasi aktif dari masyarakat secara umum, sehingga indikator yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan masih belum tercapai dengan maksimal.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program INBUP – PPIP di Desa Penampi, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis ?
2. Kenapa terjadi penurunan angka swadaya masyarakat dalam pelaksanaan INBUP-PPIP di desa penampi pada tahun 2013 ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program INBUP-PPIP di Desa

- Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
2. Pencapaian Partisipasi masyarakat desa penampi dalam pelaksanaan INBUP-PPIP terhadap indikator keberhasilan berdasarkan Petunjuk teknis pelaksanaan INBUP-PPIP.

Kegunaan penelitian

1. Sebagai wawasan bagi penulis tentang partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan Infrastruktur, terkhusus pada pelaksanaan program INBUP-PPIP dikabupaten bengkalis.
2. Sebagai bahan pengembangan keilmuan, khususnya dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR.

Kerangka Teoritis

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian, maka perlu adanya kerangka teoritis yang tetap mengacu pada permasalahan pokok yang akan diteliti. Kerangka teoritis sangat diperlukan didalam melaksanakan penelitian, tanpa adanya rumusan teori maka hasil penelitian tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kebijakan Publik

Menurut Dunn (1991: 51-54) mengatakan bahwa ada tiga bentuk atau analisis kebijakan yaitu model prospektif, model restropektif dan model intergratif didasari oleh prinsip-prinsip atau patokan-patokan umum yang membentuk kerangka analisis tersebut secara umum berpijak kepada dua pedoman yaitu fokus dan parameter analisis yaitu tiga fokus permasalahan tersebut:

1. Defenisi masalah sosial, perumusan atau pernyataan

masalah sosial yang akan direspon atau ingin ditangulangi oleh kebijakan tersebut.

2. Implementasi kebijakan sosial. Pernyataan mengenai cara atau metoda dengan mana kebijakan sosial tersebut di impelmentasikan atau diterapkan Implementasi kebijakan juga mencakup pengoperasian alternatif kebijakan yang dipilih melalui beberapa program atau kegiatan tersebut.
3. Akibat-akibat kebijakan sosial. Berbagai pertimbangan mengenai kosekuensi-kosekuensi kebijakan atau akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan sebagai dampak diterapkannya suatu kebijakan sosial.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang didasari oleh kesadaran masyarakat itu sendiri bukan dengan paksaan dari pihak-pihak tertentu. Jadi partisipasi itu artinya pelibatan diri dari semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada suatu tekad yang menjadi kesepakatan bersama.

Menurut Rahardjo dalam Pembangunan Pedesaan (2013:78) Partisipasi Masyarakat Adalah keterlibatan anggota Masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.

Selanjutnya Rahardjo menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif mengajak masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan program pembangunan

perdesaan karena mereka dianggap paling mengetahui keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakat, dengan demikian mereka mampu merumuskan solusi mengatasi masalah yang dihadapi, mampu menentukan prioritas program pembangunan.

Pendekatan partisipatif juga mendorong tumbuhnya kepercayaan diri, mempunyai kekuatan sendiri, dan memiliki martabat yang mandiri, sehingga terdorong untuk menghilangkan sebagian besar ketergantungan dari pihak luar rahardjo (2013: 91).

A. Bentuk Partisipasi

Kramer dan Arnsten dalam Jokromidjojo dalam Ahmad Ainur Rohman dkk (2009:48-49) membagi partisipasi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Partisipasi atau Keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Menurut Siagian (dalam Tifani) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas beberapa tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation*

stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek.

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan / Pemeliharaan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.

B. Hambatan Dan Kendala Partisipasi

Ada dua faktor yang menjadi penghambat bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Conyers dalam Ahmad Ainur Rohman (2009:49) yaitu :

1. Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi atau kemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada perencanaan akhir.
2. Masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan tidak menarik minat mereka atau tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Adalah Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dengan tujuan untuk meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan.

Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu dimana informan yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian pemilihan informan tidak berdasarkan kuantitas, tetapi kualitas dari informan terhadap masalah yang akan diteliti, Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik *snow ball sampling*. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu:

Tabel. 1.3. Informan Dalam Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Inisiator INBUP	1
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis	3
3	Penanggung jawab Anggaran	1
4	Perangkat Desa	2
5	OMS	2
6	Pendamping Desa Pembangunan	2
7	Tokoh Masyarakat	7
8	Masyarakat	3
Jumlah		21

Sumber : Data olahan 2014

Jenis Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian:

1. Data primer dalam penelitian ini, yaitu data yang penulis kumpulkan dari informan atau merupakan data langsung yang diperoleh dari informan penelitian dengan pertanyaan sesuai sasaran penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan

INBUP-PPIP di Desa Penampi tahun 2012-2013.

2. Data sekunder dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer dan didapatkan, seperti laporan-laporan, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian lainnya, buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan INBUP-PPIP di Desa Penampi Kabupaten Bengkalis.

Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau percakapan langsung dengan informan untuk keterangan yang diperlukan guna mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan INBUP-PPIP di Desa Penampi dengan nara sumber yang relevan dan berkompeten sesuai dengan materi penelitian,.
- b) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek penelitian.
- c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan pemberitaan media massa seputar masalah penelitian atau juga diambil dari beberapa dokumen atau hal-hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, sehingga teknis analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan dilapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara mendalam

dan studi dokumentasi berdasarkan kondisi yang ada, selanjutnya data dikumpulkan dan diklasifikasikan menurut jenisnya, kemudian diolah dan diuraikan serta diberi pembahasan-pembahasan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Instruksi Bupati No. 01 Tahun 2012 Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan.

Dalam rangka membangkitkan kembali semangat kegotong-royongan masyarakat dalam pembangunan, yang mana selama ini pola hidup masyarakat dipandang telah semakin jauh meninggalkan gotong-royong dalam proses pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati Bengkalis mengeluarkan Instruksi No. 01 tahun 2012 tentang program penguatan Infrastruktur pedesaan atau disingkat (INBUP-PPIP) sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tingkat pedesaan, dan pula sebagai langkah yang ditempuh oleh Bupati Bengkalis untuk membangkitkan kembali pola hidup gotong-royong di lingkungan masyarakat desa. Selain itu disampaikan juga oleh Bupati Bengkalis bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini cenderung lambat karena harus di bahas bertingkat dari desa, kecamatan, hingga kabupaten padahal kebutuhan akan pembangunan sangat tinggi, maka melalui INBUP PPIP tersebut diharapkan masyarakat di tingkat desa tidak perlu lagi harus menunggu lama dalam proses membangun wilayahnya, karena melalui INBUP PPIP tersebut masyarakat desa sudah dapat menentukan, merumuskan dan

melaksanakan sendiri pembangunan wilayahnya.

Prioritas Kegiatan

Penguatan Infrastruktur Pedesaan dilaksanakan dengan prioritas yang direkomendasikan sebagai berikut:

- a) Kegiatan yang disepakati melalui musyawarah desa dan telah dilakukan verifikasi oleh Pendamping desa pembangunan dan disahkan oleh kepala Desa.
- b) Kegiatan yang diperkirakan Mampu dikerjakan oleh masyarakat setempat dalam tahun anggaran berjalan
- c) Kegiatan yang tidak terlalu memerlukan perhitungan atau analisa teknis yang tinggi (konstruksi sederhana) atau teknologinya sudah di kuasai oleh masyarakat/Desa.
- d) Kegiatan yang materialnya mudah diperoleh atau secara umum tersedia serta berkualitas.
- e) Kegiatan Infrastruktur untuk kepentingan umum meliputi pembangunan jalan lingkungan/bodi jalan/semenisasi/base A, B, C, parit lingkungan, normalisasi sungai/parit, pembangunan tanggul/turap, pintu klip, pembangunan jeti/dermaga, duwiker/gorong-gorong dan jembatan.
- f) Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan di desa Penampi tahun 2012-2013

Partisipasi Masyarakat yaitu ikut sertanya setiap orang atau

sekelompok orang dalam suatu kegiatan yang merupakan aktivitas dalam organisasi atau lembaganya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan bersama. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan dituntut memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesiediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Gotong-royong atau yang sering disebut partisipasi aktif sudah menjadi nafasnya pembangunan di Indonesia, pembangunan yang dilaksanakan selama ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup di masa yang akan datang terutama bagi generasi penerus. Tanggapan, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan mempercepat terelisasi suatu tujuan. Hal itu dimungkinkan karena potensi besar dalam pembangunan tergantung banyak pada potensi

sumber daya manusia dan memiliki kemampuan yang besar pula.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental itu sendiri. Karenanya untuk mendapatkan partisipasi masyarakat terutama pada tingkat desa harus diusahakan adanya perubahan sikap mental kearah perbaikan yang tanpa adanya tekanan-tekanan. Masyarakat juga harus merasa bahwa dalam pembangunan itu terdapat kebutuhan-kebutuhan mereka.

Partisipasi dari segenap pribadi-pribadi dalam masyarakat merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pembangunan. Partisipasi menyebabkan terjalinnya kerjasama dalam masyarakat dan kerjasama ini perlu pengkoordinasian yang baik dari pemimpin, dalam hal ini dimaksudkan agar partisipasi tersebut berdaya guna secara efektif.

Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur-jalur komunikasi dalam masyarakat berjalan seimbang. Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat desa keadaan ini dapat terlaksana dengan baik apabila toleransi dan kebersamaan dalam bermasyarakat terjalin dengan baik yang berdampak pada asas swadaya dan gotong-royong hidup dalam setiap kegiatan di masyarakat.

Merujuk pada beberapa penjelasan di atas maka Keberhasilan pelaksanaan Instruksi Bupati program penguatan infrastruktur pedesaan sangat bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat, baik secara kelembagaan dan terlebih lagi sebagai individu masyarakat, karena secara prinsip program ini ditujukan untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu tanggung jawab berhasil tidaknya program ini bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan dengan apa yang sudah penulis bahas sebelumnya terbagi atas beberapa tahapan, begitu pula dalam pelaksanaan INBUP-PPIP yang juga penulis bagi dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan, dan
3. Pelaksanaan

Perencanaan Kegiatan

1. Musyawarah Desa I Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

Sebagai Langkah awal dari pelaksanaan kegiatan INBUP – PPIP dilakukan persiapan sebagai berikut :

- a) Sosialisasi pelaksanaan INBUP-PPIP ditingkat kecamatan dan Desa
- b) Pembentukan OMS sebagai lembaga pengelola program penguatan infrastruktur pedesaan dilakukan pada MUSDES I dengan mekanisme pemilihan adanya keterwakilan dusun minimal 1 (satu) orang.
- c) OMS terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota.
- d) Musyawarah desa juga menginventarisir dan menghimpun kegiatan yang disepakati untuk didanai Orogram Penguatan Infrastruktur Pedesaan melalui perencanaan musyawarah desa. Usulan kegiatan yang akan didanai bersumber dari hasil Musrenbang desa dan atau dari dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah di Perdeskan.

- e) OMS dan PDP melakukan survey harga minimal pada 3 (tiga) toko terdekat, harga upah dan material jika bersumber dari desa yang bersangkutan serta mengumpulkan data standarisasi satuan harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagai dasar penyusunan desain gambar dan RAB.
- f) Membuat Gambar Rencana konstruksi dan RAB kegiatan yang dilaksanakan oleh OMS dengan di dampingi oleh PDP.
- g) Gambar Rencana konstruksi dan RAB kegiatan di verifikasi oleh PDP dan Korcam PDP selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan INBUP-PPIP di setiap desa mutlak perlu dilakukan. Pelaksanaan INBUP-PPIP diawali dengan Tahapan perencanaan kegiatan, yaitu tahap awal dan yang menentukan keikutsertaan masyarakat dalam tahapan selanjutnya, karena apabila masyarakat merasa tidak dilibatkan di dalam tahapan perencanaan ini, maka akan sulit bagi masyarakat ikut serta dalam langkah selanjutnya karena di dalam tahapan ini diputuskan apa yang akan dilakukan atau infrastruktur apa yang akan dibangun dalam menunjang kebutuhan masyarakat secara umum, pada tahapan ini ide, pemikiran, dan gagasan dari berbagai pihak sangat di perlukan, agar apa yang akan dikerjakan memberi manfaat yang baik bagi masyarakat luas.

Dalam proses pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat berdasarkan kriteia kepengurusan, selanjutnya Kepala Desa membentuk tim verifikasi yang terdiri dari Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD), KAUR pembangunan Desa, dan Pendamping Desa Pembangunan yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memimpin pada saat pemilihan kepengurusan OMS. Kepala desa bersama dengan pendamping desa mengirmkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat luas/tokoh masyarakat/RT/RW/Dusun, surat itu berisikan pemberitahuan untuk setiap kepala dusun menyiapkan beberapa orang (1-5 orang/dusun) untuk dijadikan sebagai calon OMS.

Disinilah akan terlihat partisipasi masyarakat dalam tahapan pembentukan OMS yang mana kepala dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun I yang bertujuan untuk membahas dan menetapkan siapa-siapa saja yang akan diajukan sebagai calon pengurus OMS perwakilan dari masing-masing dusun. Hal ini pula disampaikan oleh bapak Sugeng Hadi Utomo selaku Kepala dusun Karang Sari pada tanggal 16 juni 2015.

Berdasarkan penjelasan dari wawancara yang penulis lakukan, dapat dipahami bahwa Partisipasi masyarakat pada musyawarah dusun I, yaitu tahapan pengajuan calon pengurus OMS yang akan di ajukan di dalam Musyawarah Desa I berupa partisipasi kehadiran dalam Musyawarah dusun I, partisipasi mengajukan usulan, dan partisipasi kesediaan diajukan menjadi calon pengurus OMS, sejauh dari data yang penulis himpun dari lokasi penelitian, masih terlihat partisipasi masyarakat dari setiap dusun untuk membahas dan mengusulkan calon dari dusun masing-masing, meskipun dari jumlah yang hadir tidak keseluruhan masyarakat ikut serta, melainkan

perwakilan dari masyarakat masing-masing RT/RW.

Jika diinjau dari daftar hadir peserta musyawarah dusun I dan penjelasan bapak zulaini selaku salah seorang Kepala dusun Penampi, dapat dilihat bahwa memang tidak banyak masyarakat yang turut hadir di dalamnya, hanya sekelompok kecil masyarakat saja yang ikut dalam agenda musyawarah tersebut, seperti RT, RW, anggota BPD, tokoh masyarakat dan kelembagaan desa lainnya, sementara masyarakat secara umum tidak begitu terlihat aktif ikut serta dalam musyawarah tersebut.

Setelah masing-masing dusun menetapkan beberapa calon perwakilan, selanjutnya Pendamping Desa bersama Kepala Desa mengadakan Musyawarah Tingkat Desa I, yang bertujuan untuk membahas tentang:

1. Penjelasan tujuan, prinsip, dan pendekatan program
2. Penjelasan Struktur Organisasi OMS
3. Penjelasan kriteria pemilihan OMS

Dari apa yang disampaikan dalam wawancara, dapat disimpulkan bahwa diadakannya musyawarah pada tingkat dusun yaitu agar masyarakat lebih leluasa ikut serta, dan aktif dalam menyampaikan ide, gagasan, serta kesediaan dalam mengelola program tersebut, karena tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat umum masih awam, dan cenderung segan-menyegan mengajukan diri, terlebih dalam forum-forum formal yang dihadiri oleh banyak orang, dan agar terbangun satu bentuk komunikasi bertingkat yang lebih baik, yang mana pembahasan usulan dan gagasan dilakukan pada tingkat dusun, sehingga pada tingkat desa tinggal

mematangkan usulan dan dapat langsung menghasilkan keputusan, hal itu dilakukan pula untuk membangun satu bentuk pembahasan bertingkat mulai dari tingkat dusun, bahkan tidak menutup kemungkinan dari tingkat lingkungan RT.

2. Musyawarah Desa II Pengajuan Usul kegiatan

Pengajuan Usulan Kegiatan pembangunan Infrastruktur dasar program INBUP-PPIP berdasarkan petunjuk teknis INBUP-PPIP dilakukan didalam Musyawarah Desa II yang diselenggarakan oleh pendamping desa bersama-sama dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

Dari kutipan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan musyawarah dusun baik musyawarah dusun I maupun Musyawarah dusun II, tidak semua masyarakat ikut hadir dalam pelaksanaannya, dan yang hadir masih segelintir orang saja yaitu RT, RW, beberapa dari kelembagaan yang ada di desa serta beberapa orang warga, padahal sebagaimana yang disampaikan bahwa melalui musyawarah dusun inilah masyarakat dapat leluasa berperan aktif menyampaikan ide, pemikiran, dan gagasannya mengenai kebutuhan infrastruktur di lingkungannya, melalui musyawarah dusun ini pula dapat terbangun sikap gotong-royong masyarakat, karena tentu masyarakat akan lebih merasa bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati, sehingga selanjutnya mereka akan ikut dalam pelaksanaan kegiatannya karena merasa bahwa usulan itu dari mereka.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai perencanaan kegiatan dari Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan di

desa Penampi, penulis memandang bahwa dari mulai proses pembentukan Organisasi Masyarakat dalam musyawarah musyawarah dusun I yang seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk dapat andil membahas dan mengajukan para calon pengurus Organisasi Masyarakat Setempat dari masing-masing dusunnya tidak begitu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini juga menjadi celah bagi sekelompok orang yang memiliki kesempatan cenderung memanfaatkan musyawarah ini sebagai tempat bagi mereka untuk mendapat keuntungan, dengan mengusulkan orang-orang yang mereka saja, maksudnya dari sebelah pihak mereka, sehingga apa yang terjadi pada tahun 2012 yaitu permasalahan diakibatkan oleh ketua Organisasi Masyarakat Setempat yang mengakibatkan terjadinya silpa desa.

Kondisi ini juga tentu saja berdampak buruk bagi keberhasilan INBUP-PPIP karena melalui musyawarah dusun pula dilakukan penyampaian yang mendalam berkaitan dengan program tersebut, sehingga menjadi kewajiban ketika ada sebagian masyarakat yang merasa enggan, hal ini diakibatkan karena mereka kurang atau bahkan tidak memahami program INBUP-PPIP tersebut, sehingga harapan dari bergulirnya program ini yaitu ebagai pemantik atau pendorong tumbuh kembangnya budaya gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat di desa penampi menjadi kurang terwujud.

Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	pelaksanaan/
pembangunan fisik	Infrastruktur

adalah tahap yang paling kelihatan bentuk partisipasi dari masyarakat, karena dalam tahap ini masyarakat dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya. Temuan pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan/pembangunan fisik infrastruktur, bentuk partisipasi masyarakat sebagian besar berbentuk 2 (dua) wujud partisipasi yang menonjol disini adalah partisipasi dalam bentuk tenaga, karena partisipasi dalam bentuk tenaga ini disumbangkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang tergolong rendah dan tidak menentu, karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh tani, petani dan nelayan yang berpenghasilan rendah.

Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan ini dilakukan melalui beberapa pendekatan yakni:

a) Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara swakelola dengan pola Organisasi Masyarakat Setempat, padat karya dan terbuka (transparan) dengan mempergunakan tenaga kerja setempat.

Secara umum berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan pada lokasi penelitian ditemukan bahwa memang yang menjadi pengurus Organisasi Masyarakat Setempat ialah warga desa penampi yang disaring melalui beberapa proses bertingkat mulai dari dusun, dan berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pengurus Organisasi Masyarakat Setempat mendapatkan bayaran, namun bayaran itu bukan merupakan gaji melainkan uang lelah.

Pekerja yang yang melaksanakan kegiatan pembangunan juga merupakan masyarakat setempat yang berprofesi sebagai tukang bangunan, dan mereka dalam melakukan pekerjaannya mendapat bayaran, namun bayaran yang mereka terima dibawah standar upah tukang, hal ini yang dinilai menjadi swadaya dari masyarakat.

b) Dalam melaksanakan kegiatan swadaya gotong-royong diharapkan adanya over prestasi (melebihi target)

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian memang telah terjadi over prestasi dalam pembangunan infrastruktur, dan nilai swadaya masyarakat, ini ditemukan terjadi pada tahun 2012 yang terdapat angka swadaya yang cukup tinggi terjadi dalam pelaksanaan di tahun tersebut, namun pada tahun 2013 tidak ditemukan hal tersebut.

Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Bentuk Partisipasi masyarakat pasca pembangunan fisik ialah pemelihara yang berkelanjutan, infrastruktur yang dibangun berdasarkan kehendak dan kebutuhan masyarakat sendiri serta menjadi penopang kegiatan sehari-hari terutama penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi, jika kita merujuk dari hal tersebut tentunya infrastruktur tersebut semestinya akan dipelihara dan diraat oleh masyarakat setempat, namun yang penulis temukan dilokasi penelitian justru tidak menunjukkan hal demikian, pada tahap pasca pembangunan fisik, melakukan pemanfaatan yaitu bahwa semua infrastruktur yang telah dibangun, oleh masyarakat di gunakan dengan sebaik-baiknya, masyarakat menjadi sangat terbantu

dengan adanya program INBUP-PPIP ini, disampaikan sendiri oleh bapak suginin

Dari hasil wawancara dapat di analisa bahwa Infrastruktur yang telah dibangun melalui program INBUP-PPIP ini memberi manfaat yang baik dalam menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat desa penampi.

Segala sesuatu yang digunakan secara terus-menerus dipastikan akan mengalami kerusakan baik perlahan, maupun secara cepat, penulis menemukan bahwa infrastruktur yang telah dibangun melalui program INBUP-PPIP ini hingga penulis melakukan penelitian pada tahun 2015 ternyata masih belum ada dilakukan perawatan atau pemeliharaan secara berkala, baik oleh pemerintah selaku inisiator program, maupun oleh masyarakat. Dalam hal pemanfaatan bangunan masih pada tahap pemakaian, karena memang INBUP-PPIP ini hanya untuk pembangunan fisik saja. tidak ada biaya berkala yang dikeluarkan untuk pemeliharaan. Hal ini dikatakan oleh bapak ahmad sanusi.

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bupati Bengkalis dapat dilihat bahwa baik pemerintah maupun masyarakat sampai hari ini tidak melakukan pemeliharaan yang berkala terhadap kondisi fisik bangunan tersebut, dari pihak pemerintah berharap bahwa masyarakatlah yang melakukan pemeliharaan karena seyogyanya bangunan yang didirikan oleh masyarakat sendiri akan pula dipelihara oleh masyarakat, dilain sisi masyarakat tidak juga melakukan pemeliharaan yang berkala dikarenakan dana tersebut hanya untuk membangun, dan sampai hari ini tidak ada dana yang kemudian

diturunkan berkala untuk pemeliharaan Infrastruktur tersebut.

Hambatan dan Kendala Partisipasi Masyarakat

Hambatan dan kendala penting yang dihadapi oleh masyarakat desa penampi untuk ikut aktif berpartisipasi dalam partisipasi dalam pelaksanaan program INBUP-PPIP di tahun 2012-2013 yaitu:

1. Waktu,

masyarakat akan meluangkan waktunya untuk kegiatan pembangunan apabila mereka merasa bahwa program pembangunan itu berguna bagi dirinya.

2. Menyusun dan membuat pandangan mereka sendiri

Membuat pandangan sendiri maksudnya ialah cara pandang masyarakat yang terbangun dari program INBUP-PPIP itu sendiri, disatu sisi keberadaan program INBUP-PPIP dengan dana yang cukup besar kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk mengelolanya. Partisipasi akan menjadi kendala apabila dalam forum-forum masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk menyalurkan pandangan mereka.

3. Sikap Profesional

Sikap dari para pelaksana (pendamping dan aparat pemerintah) harus berpihak kepada masyarakat. Mereka harus percaya kepada kemampuan masyarakat dan dapat membagi pengetahuannya. Belajar dari pengalaman, semua kelompok masyarakat berbeda. Para pelaksana harus fleksibel dan mau belajar dari pengalaman serta mencoba beberapa metode dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kapasitas dari masyarakat dan institusi dapat berubah dengan sendirinya, mendapat pengakuan,

dukungan dan menambah kepercayaan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis jabarkan di bab III, penulis mengambil beberapa kesimpulan terkait hal tersebut.

1. Partisipasi masyarakat desa penampi dalam pelaksanaan program INBUP-PPIP berupa partisipasi kehadiran dalam rapat, kesediaan menjadi anggota OMS, memberikan ide dan pemikiran pada tahap perencanaan. Kemudian partisipasi tenaga dan penghibahan lahan pada tahap pelaksanaan, serta pemanfaatan infrastruktur bangunan yang telah selesai dikerjakan.
2. Penurunan angka partisipasi sebagai dampak dari permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan di tahun 2012, masih belum terbangun pemahaman bersama di lingkungan masyarakat tentang semangat dari INBUP-PPIP, yang berdampak pada tidak adanya inisiatif yang terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala, sehingga indikator keberhasilan INBUP-PPIP masih belum tercapai pada 2 tahun pertama realisasi program tersebut.
3. Disamping keberadaannya yang memberi manfaat yang besar bagi masyarakat, keberadaan INBUP-PPIP ini juga memicu tumbuhnya sikap malas dan hitung-hitungan dalam bergotong-royong, muncul anggapan bahwa setiap kegiatan itu ada anggarannya, sehingga berdampak pada berkurangnya aktifitas gotong-royong masyarakat.

Saran

Sesuai penelitian dan analisis yang penulis buat dalam analisis ini penulis ingin memberikan beberapa saran yakni:

1. BPMPD selaku koordinator realisasi dari INBUP-PPIP ini hendaknya melakukan sosialisasi yang lebih mendalam terhadap masyarakat desa tentang keberadaan program ini, dan posisi masyarakat dalam pelaksanaan INBUP-PPIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn N, William. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan*, Jogjakarta: UGM Press
- Adisasmita, Rahardjo. 2013, *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif-Tipologi-Strategi dan Konsep Desa Pertumbuhan)* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rohman, Ainun dkk. 2009, *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang : Averros Press.

Peraturan:

- Instruksi Bupati Bengkalis Nomor 01 Tahun 2012 tentang Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan.
- Peraturan Bupati Bengkalis No. 39 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis INBUP-PPIP